

Hasil Penelitian

ANALISIS KERENTANAN USAHA MIKRO KECIL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG

(ANALYSIS OF THE VULNERABILITY OF MICRO AND SMALL ENTERPRISE DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN SUMEDANG REGENCY)

*Nugrahana Fitria Ruhyana**, *Hadi Ferdiansyah**, *Nenden Suwardini***, *Arifin Arifin****

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang
Jawa Barat - Indonesia
Email: nugrahana@gmail.com

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jl. Ir. H. Juanda No.287, Bandung
Jawa Barat - Indonesia

*Universitas Sebelas April Sumedang
Jl. Angkrek No.19, Sumedang
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 18 Mei 2021; Direvisi: 26 Juni 2021; Disetujui: 24 Juli 2021

ABSTRAK

Usaha mikro dan kecil (UMK) paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Banyak UMK di Kabupaten Sumedang yang kurang adaptif ketika terjadi pembatasan sosial sehingga mengalami penurunan omzet bahkan sebagian lainnya menutup usaha. Diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui analisis kerentanan sehingga dapat diketahui daerah mana yang paling rawan pandemi Covid-19, terutama dari aspek sosial ekonomi terkait UMK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis spasial dengan teknik skoring pada setiap variabel penentu dalam analisis kerentanan yang diadopsi dari Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Data yang digunakan adalah Potensi Desa (potensi desa) tahun 2018 dan 2019 serta beberapa data pendukung dari instansi terkait. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi yaitu Kecamatan Jatinangor, dikarenakan banyaknya UMK dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari sektor-sektor yang terkena dampak restriksi sosial akibat Pandemi Covid-19 seperti industri, perdagangan dan jasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di tingkat daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong kegiatan perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha Badan Usaha Milik Desa, perluasan jangkauan sinyal internet, dan mendorong perluasan dari jaringan layanan pengiriman barang.

Kata kunci: kerentanan, usaha mikro dan kecil, pandemi covid-19

ABSTRACT

Micro and small enterprises (MSEs) are most vulnerable to the Covid-19 pandemic. Many MSEs in Sumedang Regency are less adaptive when there are social restrictions so that their turnover decreases and some even close their businesses. A proper policy from the Sumedang Regency government is needed to overcome this problem, one of which is through a vulnerability analysis so that it can be seen which areas are most prone to the Covid-19 pandemic, especially from the socio-economic aspects related to MSEs. This study uses a spatial-based quantitative descriptive method with scoring techniques on each determining variable in the vulnerability analysis adopted from the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). The data used is Potensi

Desa (village potential) in 2018 and 2019 as well as some supporting data from related agencies. The results of the vulnerability analysis show that there is one sub-district with a very high level of vulnerability, namely Jatinangor District, due to the large number of MSEs and most of the livelihoods of its population from sectors affected by social restrictions due to the Covid-19 pandemic such as industry, trade and services. Efforts that can be made to increase resilience to the Covid-19 pandemic at the regional level are by increasing adaptive capacity, especially encouraging economic activity at the village level through increasing Village-owned enterprises (BUMDES) business units and business scale, expanding internet signal coverage, and encouraging the expansion of the goods delivery service network.

Keywords: *vulnerability, micro and small enterprises, covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan salah satu bencana terbesar abad ini. Mengacu pada paradigma kebencanaan, bahwa dampak dari bencana sebagai sebuah kejadian yang tidak wajar adalah disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor sosial dan bahaya dari bencana itu sendiri (Blaikie, Cannon & Ian Davis, 2005). Konsekuensi dari paradigma ini adalah semakin meningkatnya pemahaman akan konsep kerentanan dan ketahanan sebagai konsekuensi dari dampak sebuah bencana (Noy and Yonson, 2018).

Secara khusus dalam aspek perekonomian, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pihak paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam dokumen OECD (2020) diungkapkan bahwa UMK yang bergantung pada pemasok dari negara lain dan atau dari luar wilayahnya lebih rentan dalam masa pandemi Covid-19. Demikian pula, hambatan dalam transportasi laut, darat atau udara semakin mempengaruhi kerentanan UMK tersebut. Sebagian besar UMK sedang berada dalam kondisi ketahanan dan fleksibilitas yang rendah dalam menangani guncangan Covid-19. Ketidakmampuan biaya untuk peralihan bisnis ke *teleworking*, tingkat digitalisasi yang rendah, kesulitan dalam mengakses dan mengadopsi teknologi menjadi faktor kerentanan lainnya (OECD, 2020).

Sebagian UMK yang masih mampu bertahan saat ini, memiliki strategi dan kreatifitas untuk mempertahankan usahanya. Upaya yang cukup efektif diterapkan salah satunya adalah perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi (Pakpahan, 2020;Wulandari, 2020). Menghadirkan kemudahan dalam berbelanja adalah kenyataan yang harus dijalani mengingat efisiensi daya, meminimalisir biaya dan faktor kenyamanan yang mejadi prioritas pelanggan saat ini (Abdurrahman, 2020).

Secara umum, dapat diungkapkan bahwa permasalahan UMK di Indonesia adalah menyangkut permasalahan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, iklim investasi dan iklim usaha yang kurang kondusif, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang kurang, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang tidak memadai, sulitnya

memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh ijin usaha atau badan hukum, dan sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan (Amri, 2015).

Sebagai penggerak perekonomian daerah dan nasional, pemerintah daerah maupun nasional perlu membangun strategi dan kebijakan untuk mengurangi kerentanan UMK akibat dampak Covid-19. Untuk merancang strategi dan kebijakan tersebut khususnya bagi pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis kerentanan. Diposaptono dalam Miladan (2009) mengungkapkan bahwa analisis kerentanan ditekankan pada kondisi fisik kawasan dan dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks bencana alam, analisis kerentanan digunakan untuk mengidentifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam jangka pendek yang terdiri dari hancurnya permukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumber daya alam lainnya.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, termasuk yang terdampak akibat pandemi covid 19. Upaya pengendalian penyebaran virus COVID 19 dilakukan dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.274 -Hukham/2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19. PSBB tersebut mengakibatkan berbagai mobilitas menjadi terbatas sehingga berpengaruh besar terhadap berbagai sektor bisnis termasuk UMKM.

Upaya bertahan yang dapat dilakukan diantaranya dengan cara merumahkan pegawainya sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kondisi seperti ini terjadi secara merata di 27 kabupaten kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Sumedang, sehingga

diperlukan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi agar kondisi tidak semakin memburuk

Sebagai langkah awal upaya pemulihan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMK di Kabupaten Sumedang, diperlukan penentuan lokasi paling rentan dari dampak pandemi Covid-19 sehingga menjadi prioritas kebijakan pemulihan UMK oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hasil dari analisis kerentanan ini juga akan memetakan aspek sosial ekonomi di tingkat wilayah yang perlu mendapat perhatian dan menjadi landasan penentuan strategi, kebijakan serta prioritas perencanaan.

Hasil kajian OECD (2020) menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 kepada UMK dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMK mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*). Kedua sebab tersebut berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu ketika pandemi masih ada. Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang dan jasa berdampak pada UMK tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UMK tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak.

Sebelum terpaan bencana Covid-19 terjadi, kerentanan UMK di Indonesia telah dihadapkan pada berbagai persoalan. Keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan menjadi persoalan utama yang dihadapi UMK. Sedangkan menurut Sudayanto, Ragimun, dan Rahma (2011) beberapa kendala UMK yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku yang harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, *skill*, aturan perburuhan dan lain sebagainya.

Dalam perspektif kebencanaan, dampak Covid-19 terhadap UMK tidak hanya disebabkan oleh komponen bahaya Covid-19 semata. Oxfam dalam Hapsoro & Buchori (2015) mendefinisikan bahwa bencana (*disaster*) merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektifitas atas komponen bahaya (*hazard*) yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan

(*capacity*) suatu komunitas dalam mengelola ancaman.

Djuraidah (2009) menyatakan bahwa dengan terbitnya UU No. 24/2007 menandai babak baru dalam perubahan cara pandang dan pengelolaan penanggulangan bencana, yakni dari yang bersifat responsif menjadi pengurangan risiko bencana yang lebih menekankan pada upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Inti dari pengurangan risiko bencana adalah membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana.

Oleh karena itu diantara upaya mengurangi risiko bencana khususnya Covid-19 terhadap UMK adalah dengan menggunakan analisis kerentanan. Pada prinsipnya analisis kerentanan dapat digunakan sebagai : (1) alat diagnostik untuk memahami masalah-masalah dan faktor-faktor penyebab kerentanan, (2) alat perencanaan sebagai dasar penetapan prioritas kegiatan serta urutan kegiatan yang direncanakan, (3) alat pengukuran risiko untuk menilai risiko secara spesifik, dan (4) alat untuk pemberdayaan dan mobilisasi kelompok masyarakat yang rentan (Benson and Twigg, 2007).

Analisis kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kewilayahan dengan memasukkan variabel-variabel sosial ekonomi yang diduga kuat akan menentukan keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi dari UMK ketika menghadapi dampak pandemi Covid-19, misalnya pembatasan sosial, sehingga menyebabkan terganggunya permintaan dan penawaran produk barang/jasa.

Potensi masyarakat dan ekonomi untuk menghindari dampak buruk dan kapasitas untuk bertahan dan pulih dari bencana dipengaruhi oleh pertemuan faktor sosial ekonomi (Noy and Yonson, 2018). Selain itu, kerentanan sosial ekonomi merupakan aspek yang relatif dapat diubah dan diintervensi sehingga pengurangan risiko bencana dapat diperkecil (Hapsoro and Buchori, 2015).

Kerentanan didefinisikan sebagai sejauh mana suatu sistem atau bagian dari sistem dapat bereaksi atau merespon secara merugikan ketika terjadi bencana (Proag, 2014). Untuk menentukan variabel apa saja yang menjadi penentu kerentanan UMK yang menjadi fokus penelitian ini digunakan berbagai studi literatur atau hasil penelitian sebelumnya.

Pihak-pihak yang terdampak langsung oleh adanya pandemi Covid-19 adalah masyarakat secara umum yang dapat diwakili oleh kepadatan penduduk, dan pihak yang secara spesifik terdampak adalah pelaku UMK yang sejak awal pandemi ini mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan (Abdurrahman, 2020). Semakin padat suatu wilayah akan sangat berpengaruh pada kerentanan sosial masyarakat. Tingginya kepadatan penduduk menggambarkan tingginya

peluang jatuhnya korban jiwa maupun harta benda sehingga mengancam kelangsungan hidup masyarakat (Hapsoro and Buchori, 2015). Sementara keberadaan UMK akan menambah objek keterpaparan yang secara langsung terdampak oleh adanya pembatasan sosial

Pengukuran sensitivitas menggunakan indikator kemiskinan dan matapencaharian penduduk. Artinya jika suatu wilayah mengalami bencana, baik alam maupun non alam, maka wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan lebih sensitif terkena dampak sehingga meningkatkan kerentanan akibat dampak bencana tersebut. Demikian pula dengan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana (seperti pandemi Covid-19) yang menyebabkan banyak pekerja mengalami pengurangan jam kerja bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, bisa menjadikan masyarakat di wilayah tersebut lebih sensitif merespon ancaman yang muncul.

Hastanti and Purwanto (2019) menjadikan beberapa penelitian sebelumnya yang juga memasukkan variabel kemiskinan sebagai salah satu indikator sensitivitas sosial untuk menganalisis kerentanan jika terjadi bencana kekeringan di Dusun Pamor, Kradenan, Grobogan. Sementara lapangan usaha mayoritas penduduk khususnya di sektor perdagangan turut menentukan sensitivitas suatu wilayah ketika terjadi gangguan sistemik atau bencana. Pandemi covid-19 telah menyebabkan sektor perdagangan berkontraksi paling dalam hingga -7,78 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Sumedang (BPS Kabupaten Sumedang, 2021).

Kapasitas adaptif memiliki lebih banyak indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang berarti menurunkan tingkat kerentanan akibat adanya pandemi Covid-19. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat (Periode 12-23 Januari 2021) yang dirilis BPS Provinsi Jawa Barat (2021), mengungkapkan bahwa kebutuhan utama para pelaku usaha mikro kecil di masa pandemi adalah permodalan, sementara permasalahan yang paling krusial dihadapi adalah pemasaran. Oleh karena itu pada penelitian ini proporsi wilayah desa/kelurahan yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak dan aksesibilitas jaringan internet yang lebih luas akan memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik untuk UMK di wilayah tersebut.

Pada masa pandemi, UMKM yang mampu tumbuh dan berkembang lebih baik adalah yang menerapkan dan bergabung dalam ekosistem digital (Nurlinda and Sinuraya, 2020). Selain jaringan internet, ketersediaan jasa pengiriman barang dan pembayaran digital seperti perbankan atau minimarket, akan menentukan kapasitas adaptif suatu wilayah. Semakin lengkap fasilitas pendukung maka akan semakin tinggi kapasitas adaptif UKM. Sementara untuk sebagian besar masyarakat perdesaan yang belum terbiasa dengan ekosistem digital, keberadaan BUMDES sebagai lembaga sosial dan komersial yang melayani kebutuhan masyarakat terutama di masa pandemi (Rahmi, Ismanto and Fathoni, 2020).



Gambar 1. Pemilihan Variabel Penentu Kerentanan UMK Terdampak Pandemi Covid-19
 Sumber: Data penelitian (2020)

Koperasi, dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat seperti toko kelontong dan minimarket juga turut menentukan kapasitas adaptif UKM, terutama sebagai saluran pemasaran (Nurlinda and Sinuraya, 2020) dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal (Wilandari and Permadi, 2021). Beberapa variabel yang digunakan untuk analisis kerentanan UMK terdampak Pandemi Covid-19 disajikan pada Gambar 1.

METODE

Penelitian ini menggunakan data Potensi Desa yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2019a, 2020), serta beberapa data pendukung dari beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Data dari setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 277 desa/kelurahan diintegrasikan ke tingkat kecamatan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini sehingga diperoleh data 26 kecamatan. Data ini selanjutnya dianalisis dengan metode t-score untuk menstandarkan nilai dari setiap variabel yang berbeda satuan. Hasil skor digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan wilayah yang berbasis UMK ketika menghadapi pandemi Covid-19 sehingga diperoleh kecamatan yang paling rentan dan menjadi prioritas pemulihan ekonomi.

Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif menggunakan analisis kerentanan dari *Intergovernmental Panel for Climate Change* (IPCC) (Houghton, 1996). Analisis kerentanan (*vulnerability*) digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat terekspos terhadap bahaya atau gangguan jangka panjang baik yang sifatnya alami (bencana alam) maupun non alam. Pemahaman mengenai kerentanan akan dapat mengidentifikasi upaya-upaya untuk membangun kemampuan pemulihan (resiliensi) dari bahaya/gangguan. Pada analisis ini diidentifikasi dan dirumuskan komponen kerentanan yang terdiri dari Keterpaparan (*Exposure*), Sensitivitas (*Sensitivity*), dan Kemampuan Adaptasi (*Adaptation Capacity*) suatu daerah atau masyarakat terhadap gangguan perekonomian akibat pembatasan sosial di masa pandemi covid-19.

Kerentanan merupakan fungsi dari tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi dari suatu sistem, yang berarti tingkat kerentanan sangat dipengaruhi besarnya oleh komponen E, S, dan AC dari suatu sistem.

$$V = f(E, S, AC) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- V : vulnerability / kerentanan
- f : fungsi
- E : exposure/ keterpaparan
- S : sensitivity/ sensitivitas
- AC : adaptive capacity/ kemampuan adaptasi

Semakin tinggi tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas maka akan semakin besar kerentanan, sedangkan semakin tinggi kemampuan adaptasi maka akan semakin kecil kerentanan atau secara matematis dirumuskan dalam fungsi berikut:

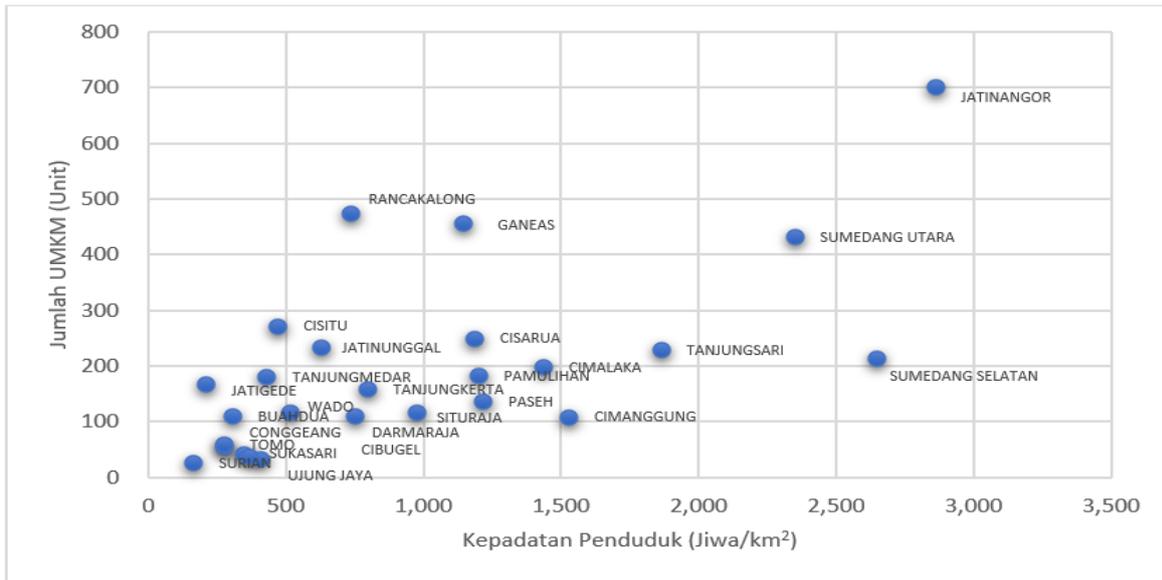
$$(Sensitivity \times Exposure) / Adaptive Capacity = Vulnerability$$

Nilai skala yang dihasilkan dari analisis kerentanan berupa skor yang kemudian dikonversi menjadi bentuk skala, terdiri dari skala 1 (tidak rentan) hingga skala 5 (sangat rentan). Wilayah dengan kerentanan tinggi dan sangat tinggi akan dianalisis dan diberikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kondisi setiap variabel di masing-masing kecamatan yang menyebabkan tingginya kerentanan.

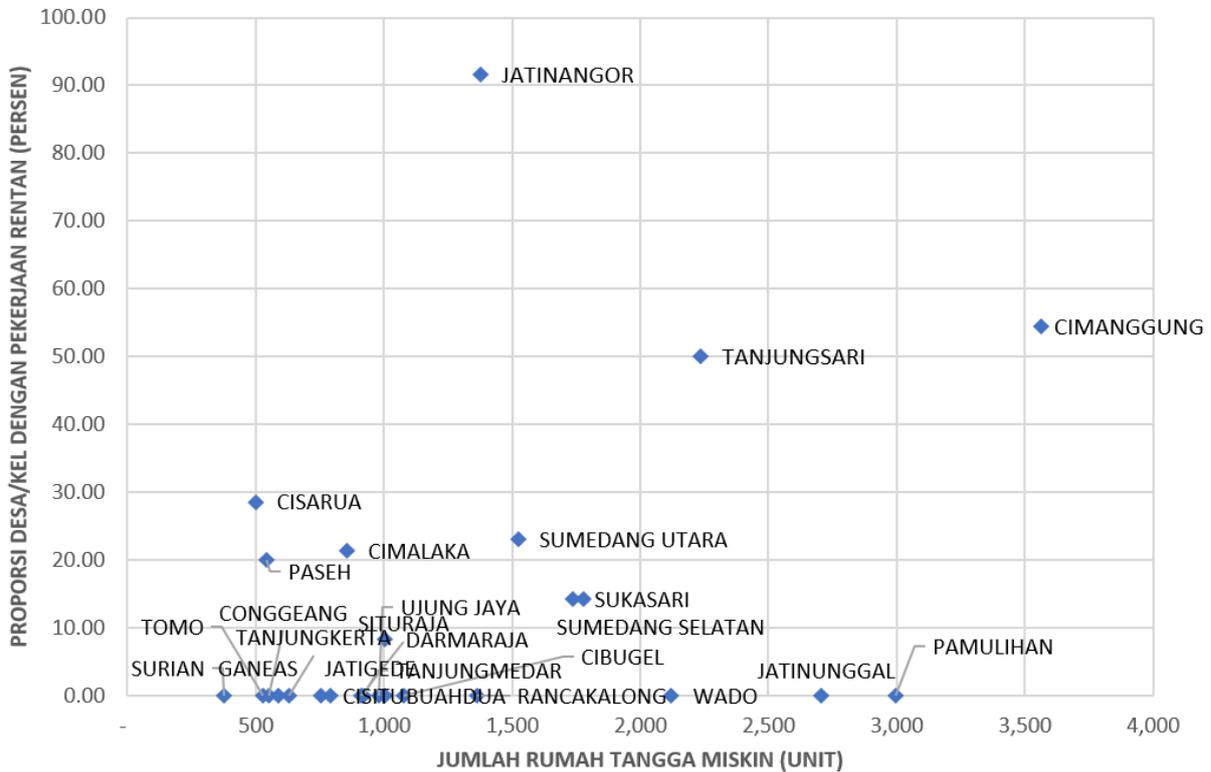
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pertama yang dilakukan untuk menentukan kerentanan adalah analisis keterpaparan yang menggambarkan seberapa banyak pihak-pihak yang akan terdampak oleh pandemi Covid-19, variabel dimaksud adalah jumlah UMK sebagai obyek utama dalam kajian ini serta kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan jumlah UMK yang banyak akan semakin terdampak oleh pandemi Covid-19 dan berpotensi menjadi sangat rentan. Gambaran keterpaparan tersebut disajikan dalam Gambar 2 dan terlihat bahwa Kecamatan Jatinangor yang berada di paling kanan atas memiliki keterpaparan tertinggi karena padatnya penduduk dan banyaknya UMK di wilayah tersebut. Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan yang juga merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang memiliki keterpaparan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya.

Analisis berikutnya adalah memetakan wilayah kecamatan berdasarkan faktor yang mempengaruhi sensitivitas UMK yaitu dengan memasukkan variabel jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin serta proporsi desa/kelurahan dengan lapangan usaha utama yang rentan dengan pembatasan sosial, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Lapangan usaha pembandingnya yang cukup aman dari pembatasan sosial adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Semakin banyak jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin serta tinggi proporsi desa/kelurahan di suatu kecamatan yang matapencaharian penduduknya di sektor rentan pembatasan sosial maka akan semakin sensitif ketika pandemi Covid-19 melanda wilayah tersebut.



Gambar 2. Jumlah UMK dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Sumber: Data penelitian (2020)



Gambar 3. Pekerjaan Rentan Terdampak Pandemi Covid-19 dan Jumlah Rumah Tangga
Sumber: Data penelitian (2020)

Hubungan sensitivitas UMK antara kemiskinan dan lapangan usaha yang rentan terhadap pembatasan sosial terletak pada sisi penawaran dan permintaan akan barang/jasa yang dihasilkan. Hal ini selaras pada hasil survey yang dilakukan oleh Bartik et al. (2020) bahwa responden UMK yang telah tutup sementara di Amerika Serikat sebagian besar disebabkan pada penurunan permintaan dan masalah kesehatan karyawan, serta gangguan dalam rantai pasokan

sebagai faktor terakhir yang berpengaruh. Berikut adalah ilustrasi dari faktor sensitivitas UMK di wilayah Kabupaten pada masa pandemi Covid-19.

Gambar 3 menampilkan bahwa Kecamatan Jatinangor merupakan wilayah paling sensitif bagi UMK karena tingginya proporsi desa/kelurahan di wilayah tersebut yang bergantung pada sektor atau lapangan usaha yang rentan dengan pembatasan sosial, khususnya industri pengolahan yang menjadi penggerak utama perekonomian di

Jatinangor. Wilayah lain yang juga cukup sensitif bagi UMK adalah Kecamatan Cimanggung dan Tanjungsari yang memiliki jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin yang cukup banyak. Sementara untuk kecamatan yang berada di sisi sebelah kiri umumnya merupakan wilayah berbasis perdesaan dengan mata pencaharian utama penduduk sebagai petani sehingga relatif tidak terlalu sensitif ketika ada gangguan pada pembatasan sosial. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS (2019), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak berkontraksi hingga Triwulan II 2020 dan masih mampu tumbuh sebesar 2,19 persen dibandingkan Triwulan II 2019. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mengalami kontraksi cukup dalam, masing-masing sebesar -6,19 persen dan -7,57 persen.

Analisis berikutnya adalah penentuan kapasitas adaptif yang akan mengukur secara relatif kemampuan UMK pada setiap wilayah (kecamatan) di Kabupaten Sumedang untuk bertahan dan menyesuaikan diri dari dampak pandemi Covid-29. Resiliensi ini terlihat dari beberapa variabel yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, seperti ketersediaan lembaga keuangan, unit usaha BUMDES, fasilitas kredit yang diterima penduduk di setiap desa/kelurahan, cakupan sinyal internet

kecepatan tinggi, jumlah jasa pengiriman barang, mini market, dan toko kelontong. Semakin banyak fasilitas tersebut tersedia di suatu wilayah maka semakin tinggi kapasitas adaptif dari wilayah itu. Gambaran mengenai kapasitas adaptif dapat dilihat pada Tabel 1. Warna pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa semakin mendekati warna merah maka kapasitas adaptif semakin rendah, sedangkan semakin mendekati warna hijau berarti kapasitas adaptif semakin tinggi.

Berdasarkan Tabel 1, masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki koperasi aktif. Namun di Kecamatan Sumedang Selatan, jumlah koperasi aktif sangat tinggi sehingga pembinaan koperasi masih belum merata. Demikian pula dengan keberadaan perbankan, masih terdapat wilayah yang tidak memiliki satupun layanan perbankan. Padahal, keberadaan lembaga keuangan akan mempermudah akses UMK dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan finansial lainnya. Ketimpangan keberadaan bank ini dapat dipahami dari aspek pelayanan karena wilayah yang tidak terdapat perbankan memang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan Program Keuangan Inklusif agar pembangunan perekonomian wilayah dapat lebih merata dan mampu memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sehingga UMK dapat lebih *bankable* (Manda, 2020).

Tabel 1. Kapasitas Adaptif Kecamatan di Kabupaten Sumedang Menghadapi Dampak Covid-19

| No. | Kecamatan | Jumlah Koperasi aktif | Jumlah Bank | Jumlah unit usaha BUMDES | Persen desa/kel penerima KUR | Persen cakupan sinyal 4G/LTE | Jumlah jasa ekspedisi | Jumlah Mini-market | Jumlah toko/warung kelontong |
|----------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Buahdua | 4 | 5 | 10 | 91 | 79 | 1 | 5 | 360 |
| 2 | Cibugel | 0 | 0 | 15 | 89 | 100 | 0 | 0 | 376 |
| 3 | Cimalaka | 8 | 6 | 12 | 50 | 79 | 2 | 12 | 560 |
| 4 | Cimanggung | 1 | 1 | 12 | 86 | 100 | 2 | 7 | 527 |
| 5 | Cisarua | 0 | 1 | 8 | 89 | 100 | 1 | 0 | 127 |
| 6 | Cisitu | 7 | 2 | 10 | 50 | 100 | 0 | 1 | 347 |
| 7 | Conggeang | 3 | 5 | 10 | 93 | 17 | 2 | 6 | 349 |
| 8 | Darmaraja | 2 | 6 | 6 | 100 | 67 | 2 | 8 | 659 |
| 9 | Ganeas | 3 | 2 | 8 | 100 | 100 | 1 | 4 | 44 |
| 10 | Jatigede | 1 | 2 | 10 | 100 | 100 | 0 | 1 | 286 |
| 11 | Jatinangor | 6 | 24 | 10 | 29 | 92 | 9 | 34 | 1409 |
| 12 | Jatinunggal | 1 | 1 | 8 | 86 | 44 | 1 | 2 | 786 |
| 13 | Pamulihan | 12 | 1 | 17 | 100 | 73 | 2 | 2 | 747 |
| 14 | Paseh | 3 | 3 | 12 | 86 | 100 | 3 | 9 | 234 |
| 15 | Rancakalong | 5 | 3 | 14 | 100 | 100 | 2 | 4 | 290 |
| 16 | Situraja | 13 | 5 | 13 | 90 | 80 | 3 | 8 | 389 |
| 17 | Sukasari | 1 | 0 | 6 | 100 | 29 | 4 | 0 | 308 |
| Sumedang | | | | | | | | | |
| 18 | Selatan | 27 | 16 | 26 | 91 | 100 | 3 | 21 | 647 |
| 19 | Sumedang Utara | 1 | 23 | 4 | 100 | 85 | 5 | 14 | 1615 |
| 20 | Surian | 1 | 0 | 13 | 100 | 44 | 0 | 0 | 148 |
| 21 | Tanjungkerta | 7 | 3 | 9 | 100 | 83 | 3 | 3 | 472 |
| 22 | Tanjungmedar | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 396 |
| 23 | Tanjungsari | 9 | 12 | 22 | 100 | 75 | 4 | 13 | 1210 |
| 24 | Tomo | 1 | 4 | 8 | 56 | 100 | 1 | 5 | 307 |
| 25 | Ujung Jaya | 0 | 3 | 9 | 100 | 100 | 1 | 9 | 527 |
| 26 | Wado | 1 | 3 | 10 | 100 | 0 | 1 | 1 | 47 |

Sumber: Data penelitian (2020)

Adapun unit usaha BUMDES menampilkan data yang lebih variatif, beberapa kecamatan yang memiliki banyak unit usaha seperti Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Tanjungsari sehingga dapat mendorong aktivitas perekonomian masyarakat dengan lebih baik. Sementara itu, di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Tanjungmedar hanya memiliki unit usaha yang sangat sedikit. Keberadaan BUMDES diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa khususnya UMK, terutama di saat pandemi Covid-19 (Rahmi, Ismanto and Fathoni, 2020). Salah satu dampak pandemi ini adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga keberadaan unit usaha pada BUMDES seharusnya dapat menjadi solusi bagi mereka yang terdampak untuk kembali ke kampung halaman dan berkarya bersama masyarakat desa dengan bekal keterampilan yang dimiliki ketika bekerja di perkotaan.

Akses kredit perbankan, khususnya KUR sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada semua kecamatan sudah menerima akses ini. Bahkan di beberapa kecamatan sudah merata penyalurannya ke seluruh desa/kelurahan. Banyaknya penerima kredit perbankan mengindikasikan sudah banyak unit usaha mikro dan kecil yang memenuhi kelayakan penerima kredit (*bankable*) sehingga relatif memiliki usaha yang lebih sehat.

Cakupan sinyal internet berkecepatan tinggi pada umumnya sudah baik dan menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Wado. Kedua kecamatan ini merupakan wilayah perbatasan dengan geografis perbukitan sehingga hanya dapat mengakses sinyal yang lebih rendah seperti 3G. Dampak dari pandemi Covid-19 yang paling terasa adalah semakin dominannya penggunaan internet dalam aktivitas masyarakat seperti aktivitas bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan *meeting online* untuk pegawai kantor, hingga belajar secara daring untuk pelajar atau mahasiswa (Király *et al.*, 2020). Bagi UMK, akses internet kecepatan tinggi menjadi sangat penting di saat pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi sosial secara langsung. Internet telah menjadi sarana yang lebih mudah untuk memperoleh akses ke sejumlah besar data dan informasi, dan memudahkan pelanggan dalam berbelanja (Handayani and Handoyo, 2020).

Banyak pelaku UMK yang bangkrut atau kehabisan modal karena tidak mampu beradaptasi di saat terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat menurunnya permintaan dan terganggunya rantai pasokan serta pemasaran produknya (Aboelenien, Arsel and Cho, 2020; Hadiwardoyo, 2020). Sementara pelaku UMK lainnya justru menuai hasil lebih baik karena dapat memanfaatkan *marketplace* dan media jual beli lainnya secara *online*, bahkan mampu memasarkan

produknya lebih luas lagi (Awali and Rohmah, 2020).

Online selling saat ini menjadi primadona dalam berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya tetap berjalan seperti biasa dengan memperhatikan pola kesehatan. Media sosial menjadi trik bagi para pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya. Bagi para pelaku usaha lain yang sebelumnya tidak mengandalkan bidang teknologi, dalam keadaan seperti ini tentu harus ikut terlibat dalam digitalisasi (Alfrian & Pitaloka, 2020; Wulandari, 2020).

Ketersediaan jasa pengiriman juga merupakan fasilitas pendukung UMK yang sangat strategis di masa pandemi Covid-19 seperi ini saat ini. Mengingat preferensi masyarakat bergeser ke media online yang konsekuensinya membutuhkan jasa pengiriman barang. Beberapa wilayah kecamatan masih belum memiliki jasa ekspedisi ini, dan jumlah jasa pengiriman terbanyak masih berada di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Jatinangor. Keberadaan mini market dan toko kelontong juga menjadi sarana lain yang mendukung keberadaan UMK di masa pandemi covid-19 ini, selain membantu pemenuhan bahan baku juga dapat berperan sebagai saluran pemasaran langsung dari produk-produk UMK. Sesuai dengan ukuran pasarnya, jumlah mini market dan warung/toko kelontong masih didominasi oleh wilayah padat penduduk.

Setelah diperoleh skor dari keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, maka langkah berikutnya adalah menghitung skor kerentanan. Berdasarkan skor tersebut kemudian dikonversi dalam skala untuk mengetahui prioritas penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap UMK dan mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki di wilayah rentan tersebut agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Hasil perhitungan kerentanan tersebut disajikan pada Tabel 2. Warna yang semakin mendekati merah mengindikasikan tingkat keterpaparan dan sensitivitas yang tinggi serta kapasitas adaptif yang rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan kerentanan (Tabel 2), Kecamatan Jatinangor menjadi wilayah paling rentan di Kabupaten Sumedang akibat adanya pandemi Covid-19, khususnya pada aspek resiliensi/ketahanan UMK. Seharusnya Kecamatan Jatinangor memiliki kapasitas adaptif yang sangat baik (peringkat ke 2) dibandingkan kecamatan lainnya, namun karena keterpaparan dan sensitivitasnya sangat tinggi maka skor kerentanannya menjadi paling tinggi. Jika dianalisis dari keterpaparannya, Kecamatan Jatinangor memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan jumlah industri mikro dan kecil terbanyak di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2. Kerentanan Wilayah Berbasis UMK Akibat Pandemi Covid-19

| No | Kecamatan | Skor Keterpaparan | Skor Sensitivitas | Skor Kapasitas adaptif | Skor Kerentanan | Skala Kerentanan | Keterangan |
|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | Buahdua | 43.65 | 45.51 | 48.35 | 41.08 | 1 | Sangat Rendah |
| 2 | Cibugel | 41.04 | 45.94 | 45.42 | 41.51 | 1 | Sangat Rendah |
| 3 | Cimalaka | 52.52 | 49.42 | 52.71 | 49.24 | 2 | Rendah |
| 4 | Cimanggung | 49.70 | 72.99 | 50.88 | 71.30 | 4 | Tinggi |
| 5 | Cisarua | 53.15 | 48.90 | 46.53 | 55.85 | 3 | Sedang |
| 6 | Cisitu | 50.21 | 44.03 | 49.14 | 44.99 | 1 | Sangat Rendah |
| 7 | Conggeang | 41.11 | 42.82 | 45.95 | 38.31 | 1 | Sangat Rendah |
| 8 | Darmaraja | 45.69 | 47.37 | 48.88 | 44.28 | 1 | Sangat Rendah |
| 9 | Ganeas | 60.64 | 43.04 | 48.24 | 54.12 | 2 | Rendah |
| 10 | Jatigede | 44.94 | 44.23 | 47.97 | 41.44 | 1 | Sangat Rendah |
| 11 | Jatinangor | 78.73 | 68.26 | 63.15 | 85.10 | 5 | Sangat Tinggi |
| 12 | Jatinunggal | 49.64 | 55.67 | 45.38 | 60.89 | 3 | Sedang |
| 13 | Pamulihan | 50.73 | 57.40 | 52.48 | 55.48 | 2 | Rendah |
| 14 | Paseh | 49.10 | 47.25 | 51.75 | 44.83 | 1 | Sangat Rendah |
| 15 | Rancakalong | 59.11 | 47.66 | 51.93 | 54.25 | 2 | Rendah |
| 16 | Situraja | 47.10 | 44.95 | 53.26 | 39.75 | 1 | Sangat Rendah |
| 17 | Sukasari | 41.04 | 53.09 | 44.27 | 49.22 | 2 | Rendah |
| 18 | Sumedang Selatan | 59.49 | 53.33 | 65.19 | 48.66 | 2 | Rendah |
| 19 | Sumedang Utara | 66.03 | 53.78 | 57.34 | 61.93 | 3 | Sedang |
| 20 | Surian | 39.45 | 41.77 | 44.07 | 37.38 | 1 | Sangat Rendah |
| 21 | Tanjungkerta | 47.72 | 43.28 | 50.83 | 40.63 | 1 | Sangat Rendah |
| 22 | Tanjungmedar | 46.58 | 45.02 | 37.78 | 55.51 | 2 | Rendah |
| 23 | Tanjungsari | 55.97 | 64.06 | 59.93 | 59.83 | 3 | Sedang |
| 24 | Tomo | 41.30 | 42.67 | 49.01 | 35.96 | 1 | Sangat Rendah |
| 25 | Ujung Jaya | 40.97 | 45.38 | 50.08 | 37.13 | 1 | Sangat Rendah |
| 26 | Wado | 44.72 | 52.19 | 39.50 | 59.08 | 3 | Sedang |

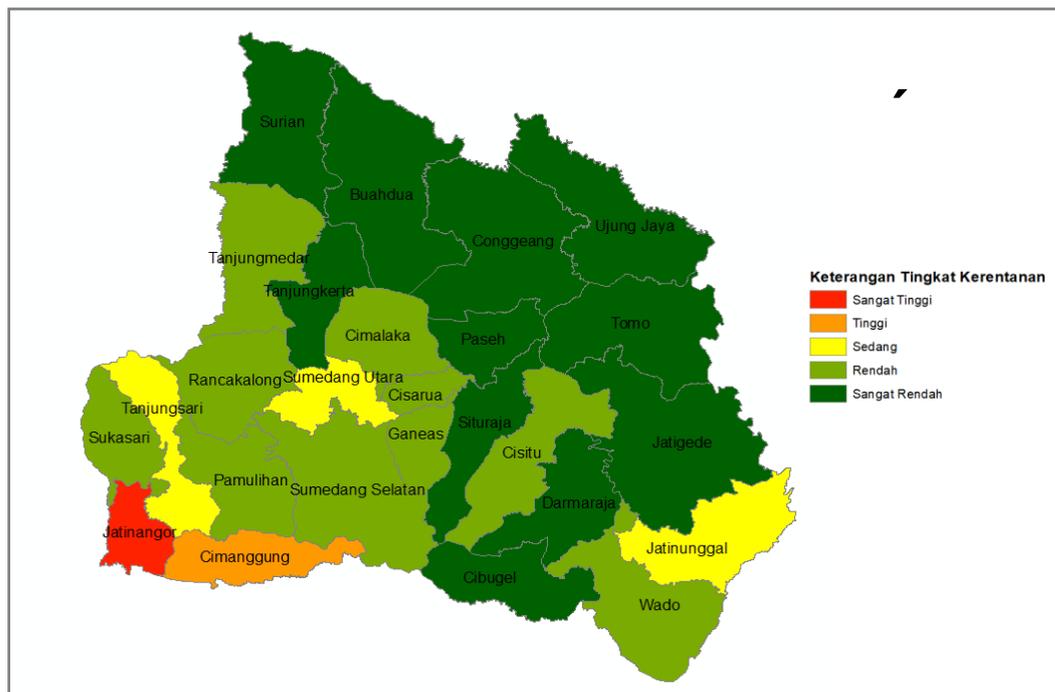
Sumber: Data penelitian (2020)

Jika dilihat dari aspek sensitivitas, Kecamatan Jatinangor berada paling tinggi berdasarkan lapangan usaha masyarakatnya yang rentan dengan pembatasan sosial, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sedangkan jika dilihat dari aspek kapasitas adaptif, Kecamatan Jatinangor masih harus ditingkatkan lagi terutama untuk memperluas penerima KUR dan mendorong berkembangnya BUMDES. Hal ini bisa dilakukan beberapa upaya seperti penambahan beberapa unit usaha baru, membina dan melakukan pendampingan pada kegiatan koperasi agar lebih mandiri dan mendukung kemajuan UMK untuk lebih baik lagi. Legalitas bentuk badan hukum yang tepat untuk pendirian BUMDES juga perlu mendapat pendampingan karena masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa (Dewi, 2014).

Kecamatan lain yang memiliki kerentanan tinggi kedua setelah Kecamatan Jatinangor, adalah Kecamatan Cimanggung. Hal ini dikarenakan skor sensitivitas yang paling tinggi, terutama pada jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin. Selain itu, penyebab lainnya hampir sama dengan Jatinangor yaitu lapangan usaha penduduknya adalah industri pengolahan yang merupakan sektor

yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Faktor lain yang perlu ditingkatkan agar Kecamatan Cimanggung memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik adalah pembinaan dan peningkatan peran dan eksistensi koperasi karena sejauh ini hanya tercatat 1 Koperasi Unit Desa yang aktif. Selain itu, yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan dan peningkatan unit usaha BUMDES, perluasan penerima KUR, dan mendorong penambahan jasa pengiriman di beberapa desa.

Visualisasi secara spasial disajikan pada Gambar 4. dan terlihat bahwa wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terkonsentrasi di wilayah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki konsentrasi perekonomian lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Sumedang, terutama keberadaan UMK. Wilayah lain yang terkategori kerentanan sedang, yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Tanjungsari. Kedua Kecamatan ini juga merupakan basis UMK dan pekerjaan utama penduduknya dari sektor terdampak khususnya industri dan perdagangan. Sementara itu, Kecamatan Jatinunggal yang juga terkategori kerentanan sedang lebih disebabkan kapasitas adaptif yang rendah.



Gambar 4. Peta Analisis Kerentanan UMK per Kecamatan di Kabupaten Sumedang
 Sumber: Data penelitian (2020)

KESIMPULAN

Hasil analisis kerentanan UMK terhadap pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang menghasilkan peta kerentanan UMK pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Jatininggal memiliki skala kerentanan tertinggi. Wilayah dengan jumlah UMK sangat banyak dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor terdampak pembatasan sosial seperti industri, perdagangan, dan jasa yang sangat rentan terdampak.

REKOMENDASI

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi dari pandemi Covid-19 di tingkat wilayah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong aktivitas perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha BUMDES, perluasan jangkauan sinyal internet, dan penambahan jaringan jasa pengiriman barang sehingga UMK tidak hanya mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, namun dapat melakukan ekspansi pasar yang lebih luas.
2. Metode dengan menggunakan analisis kerentanan ini dapat digunakan pula di kabupaten kota yang lain sehingga terpetakan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah sebagai bahan masukan bagi penentuan strategi,

kebijakan serta prioritas perencanaan. Selain itu, bahan masukan ini akan sangat berguna dalam pemberian prioritas bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten kota sehingga proses pendanaan diharapkan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan yang paling *urgent* untuk ditangani.

3. Di Tingkat Provinsi Jawa Barat, aktivitas perekonomian di tingkat desa dapat dioptimalkan dengan melibatkan pihak swasta melalui program CSR, program yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak seperti yang dilaksanakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengoptimalkan peran BUMDES, peningkatan kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan beberapa *marketplace* untuk penyelenggaraan pelatihan digitalisasi bagi para pelaku UMKM di kabupaten kota, peningkatan kerjasama dengan Dekranasda Jabar dan Bekraf Jabar dalam perluasan pasar, bantuan permodalan melalui program pemerintah pusat dan daerah didukung dengan data yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan penerimaan bantuan pada saat implementasi di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., Ibu Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E., dan Bapak Omay Komara Nurjaman, S.T., M.M., atas dukungannya terhadap penulisan artikel ini, serta kepada Sekar Nurwulandari, S.E., M.Si. yang telah membantu memperkaya referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, F. T. 2020. 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*, 2(1), pp. 147-153.
- Aboelenien, A., Arsel, Z. and Cho, C. H. 2020 'Passing the Buck versus Sharing Responsibility: The Roles of Government, Firms, and Consumers in Marketplace Risks during COVID-19', *Journal of the Association for Consumer Research*, 6(1), pp. 000-000.
- Alfrian, G. R. and Pitaloka, E. 2020. 'Strategi Usaha Mikro, KECIL, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia', *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, 6(2), pp. 139-146.
- Amri, F. 2015. 'Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(9), pp. 368-380.
- Awali, H. and Rohmah, F. 2020. 'Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak COVID-19', *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, pp. 1-14.
- Bartik, A. W. et al. 2020. 'The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(30), pp. 17656-17666. doi: 10.1073/pnas.2006991117.
- Benson, C. and Twigg, J. 2007. 'Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Guidance Notes for Development Organisations', 2007, pp. 1-184.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Potensi Desa Cimanggung Tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistik. 2020a. *Potensi Desa Tanjung Sari Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik. 2020b. *STATISTIK Pertumbuhan Ekonomi, Berita Resmi Statistik*.
- BPS Kabupaten Sumedang. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020*.
- BPS Provinsi Jawa Barat. 2021. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Jawa Barat (Periode 12-23 Januari 2021)*.
- Dewi, A. S. K. 2014. 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa', *Journal of Rural and Development*, V(1), pp. 1-14.
- Djuraidah, A. 2009. 'Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi untuk Bencana Alam di Wilayah Indonesia', *Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 5 Desember 2009*, pp. 978-979.
- Hadiwardoyo, W. 2020. 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83-92. doi: 10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Handayani, R. and Handoyo, R. D. 2020. 'Determinan Inovasi Perusahaan Menengah Besar Di Sumatera Utara', *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 17(2), pp. 183-194.
- Hapsoro, A. W. and Buchori, I. 2015. 'Kajian Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan)', *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), pp. 542-553.
- Hastanti, B. W. and Purwanto, P. 2019. 'Analisis Keterpaparan, Sensitivitas, dan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Terhadap Kekeringan di Dusun Pamor, Kradenan, Grobogan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689-1699.
- Houghton, E. 1996. *Climate change 1995: The science of climate change: contribution of working group I to the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Király, O. et al. 2020. 'Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance', *Comprehensive Psychiatry*. W.B. Saunders, 100, p. 152180.
- Manda, G. S. 2020. 'Urgensi Peningkatan Akses Layanan Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi', *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 17(1), pp. 31-38.
- Miladan, N. 2009. 'Kajian Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Semarang Terhadap Perubahan Iklim'.
- Noy, I. and Yonson, R. 2018. 'Economic Vulnerability and Resilience to Natural Hazards: A Survey of Concepts and Measurements', *Sustainability*, 10(8), p. 2850.
- Nurlinda and Sinuraya, J. 2020 'Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur', *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, (December), pp. 161-175.
- OECD. 2020. 'Coronavirus (COVID-19): SME policy responses (Updated 15July2020)', (July), p. 169.

Pakpahan, A. K. 2020 'Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah', *JIH: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), pp. 2-6.

Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, and B. W. 2005. 'Journal of Homeland Security and At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters', *Journal Of Homeland Security And Emergency Management*, 2(2).

Proag, V. 2014. 'The Concept of Vulnerability and Resilience', *Procedia Economics and Finance*. Elsevier B.V., 18(December 2014), pp. 369-376.

Rahmi, V. A., Ismanto, H. I. and Fathoni, M. Z. 2020. 'Pendekatan Bisnis Bumdes Berkemajuan Di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19', *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2), p. 90.

Sudayanto, Ragimun, dan Rahma, R. 2011. 'Starategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN', *Universitas Negeri Jember*, 1(UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN), p. 1.

Wilandari, A. and Permadi, Y. A. 2021. 'Evaluasi Strategi Marketing Bisnis Ritel Skala Kecil Tradisional Kota', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), pp. 1-8.

Wulandari, S. N. 2020. 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau', *BENING*, 7(2), pp. 165-177.